

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 - 2026





GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistematis Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR RIAU,



EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 4

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025–2026 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2025–2026 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2025–2026 ini.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

INDRA, SE., M.Si, MM

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	1
1.3.Maksud dan Tujuan.....	2
1.4.Sistematika Penulisan	3
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
a) Kedudukan	6
b) Tugas dan Fungsi.....	6
c) Struktur Organisasi.....	6
2.2 Sumber Daya	11
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	26
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	27
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Isu-isu Strategis	34
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2026.....	35
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	40
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
6.1 Rencana Program.....	44
6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII : PENUTUP.....	49
LAMPIRAN I Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Provinsi RiauTahun 2025 - 2026	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah	1
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Riau	8
Gambar 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau	14
Gambar 4.1 Cascading Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	41
Tabel 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan.....	14
Tabel 2.4 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	15
Tabel 2.5 Daftar Inventaris	15
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan	20
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2019 - 2020.....	23
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2021 - 2023.....	24
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan	28
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	38
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Riau	39
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	48
Lampiran I Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, dan Pendanaan BPKAD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

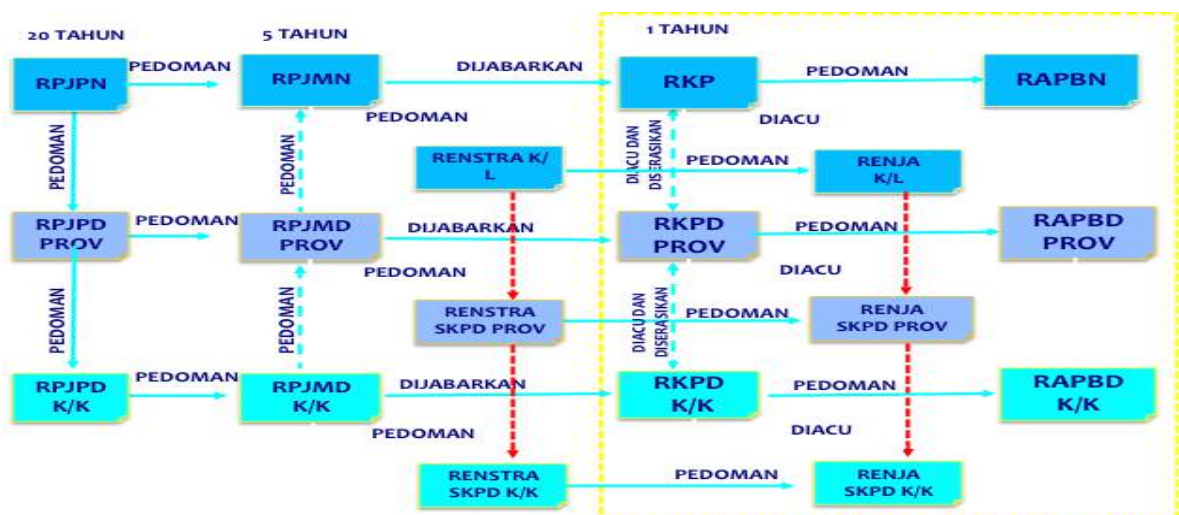
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.

Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Provinsi Riau dengan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam Tahun 2025-2026 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2026; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada:

4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

b) Tugas dan Fungsi (sesuai dengan SOTK)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi:

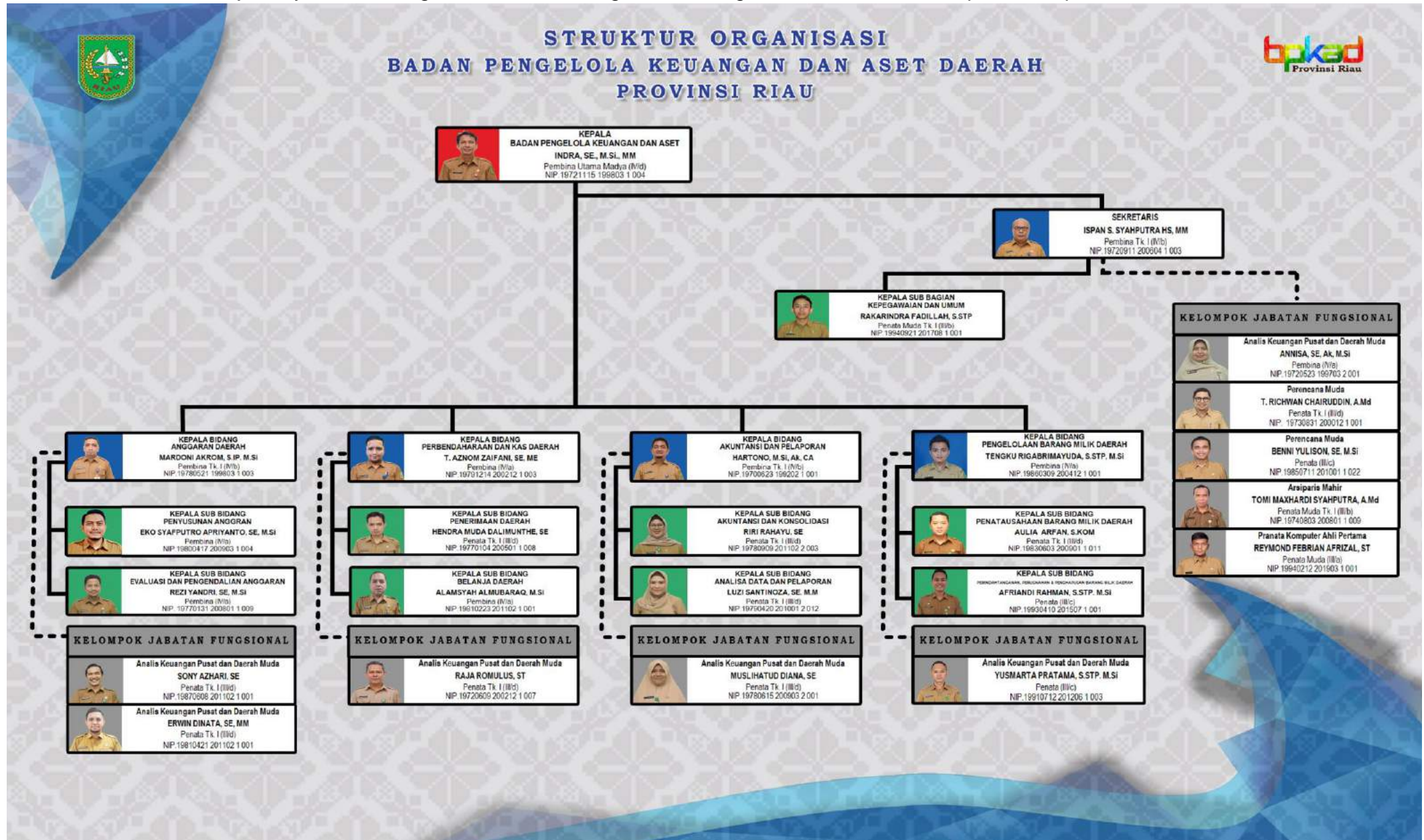
1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penerimaan Daerah;
 - 2. Subbidang Belanja Daerah;
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
 - 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

I. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Fungsi ;

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Anggaran Daerah;

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, serta fasilitasi dan pembinaan anggaran.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran daerah, meliputi antara lain penyusunan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran, fasilitasi dan pembinaan anggaran.
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Anggaran Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional Prosedur Penerimaan Daerah, Pengelolaan Kas Daerah, dan Belanja Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, meliputi antara lain penerimaan daerah, pengelolaan kas daerah, dan belanja daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Akuntansi dan Konsolidasi, Analisa Data dan Pelaporan, serta Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan untuk Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, serta Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jumlah pegawai per Desember 2023 adalah sebanyak 134 orang tidak termasuk pegawai Tenaga Administrasi BUD yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data

kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN

No	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1	-	1
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	-	1
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1	-	1
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	-	1
7.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	-	1	1
8.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	1	-	1
9.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	1	-	1
10.	Kepala Subbidang Penerimaan Daerah	1	-	1
11.	Kepala Subbidang Belanja Daerah	-	1	1
12.	Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi	-	1	1
13.	Kepala Subbidang Analisa dan Pelaporan	1	-	1
14.	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	-	1
15.	Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang	1	-	1

No	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
	Milik Daerah			
16.	Fungsional Tertentu	8	2	10
17.	Fungsional Umum	46	66	112
	J U M L A H	63	71	134

Sumber: Data Umum kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2023.

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan pendidikan dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.

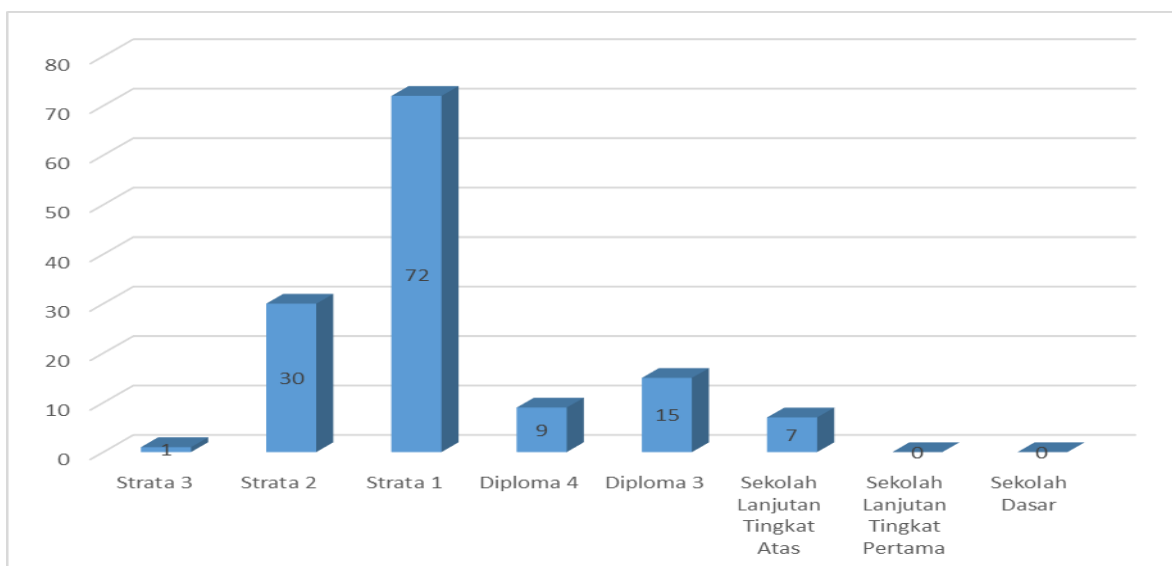
Tabel 2.2
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	PENDIDIKAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	1	1
2.	Strata 2	17	13	30
3.	Strata 1	30	42	72
4.	Diploma 4	0	9	9
5.	Diploma 3	3	12	15
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4	3	7
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
8.	Sekolah Dasar	0	0	0
	J U M L A H	63	71	134

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2023

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 134 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 2 dengan Jumlah 30 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 72 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 9 orang, Diploma 3 dengan jumlah 15 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 7 orang, sedangkan untuk kondisi saat ini ada 1 ASN yang berpendidikan Strata 3. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2023

Dari Gambar 2.1 diatas ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 127 Orang dengan Persentase 94,77 dan 7 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 5,23.

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 107 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 12 Orang dan Golongan IV 15 Orang.

Tabel 2.3
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN GOLONGAN

No	GOLONGAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	11	4	13
2.	Golongan III	50	57	98
3.	Golongan II	3	9	11
4.	Golongan I	0	0	0
	J U M L A H	64	70	134

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2023

Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

No	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
2.	ADMINISTRATOR	5	-	4
3.	PENGAWAS	6	3	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	7	2	9
	J U M L A H	19	5	24

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Desember Tahun 2023

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Station Wagon	13
2	Sepeda Motor	24
3	Minibus	12
4	Pick Up	2
5	Sedan	1
6	Pick Up Double Cabin	5
7	Microbus	1
8	Blower	1
9	Bor rotary hummer + dem	1
10	Camera	5
11	Camera Udara (Drone)	1
12	Clamp Ampere	2
13	Crimper Hidrolik	2
14	Earth tester	1
15	Elektrikal Toolkit	1
16	GPS	4
17	Handy cam	2
18	Handy Talky	20
19	Hot Gun	2
20	Insulation tester	1
21	iPad/Tablet PC	12
22	Notebook/Laptop	34
23	PC All In One	131
24	Komputer PC High End	16

No	Jenis Barang	Jumlah
25	Kabel Tester	1
26	Laser Distance meter	1
27	Leica Disto D510	3
28	Lensa Kamera	1
29	Mesin Bor	3
30	Mesin Cut off	1
31	MicroScanner Cabel Tester	1
32	Perekam Suara	1
33	Phase Indicator	1
34	Power Analyzer	1
35	Safety belt full body	2
36	Thermometer Infrared	1
37	True RMS Digital Multimeter	1
38	Genset	1
39	Alat Absensi (Solution)	4
40	Alat Pemadam Portable	5
41	Alat Pemotong Kertas	1
42	Alat Penghancur Kertas	11
43	Almari Arsip Kaca	2
44	Brand Kas	1
45	Camera Film	7
46	Filling Cabinet	15
47	Filling Kabinet (Fiesta)	7
48	HECTER	1
49	Lemari Sorong	1
50	Mesin Calculator	1
51	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
52	Mesin Fotocopy	3
53	panel ATS dan AMF	1
54	Papan Struktur	1
55	Penyekat Ruangan Server	1
56	Penyekat Ruangan/ Partisi	1
57	Peralatan Teknisi Elektronika	3
58	Plang nama	20
59	Plang Nama Tanah Pemprov	65
60	Proyektor	2
61	Rak Arsip	6
62	Rak Besi	21
63	Rak Besi/Metal	1
64	Rak Kayu	1
65	Stand Billboard	1
66	AC Standing	5
67	Alat Dapur Lainnya	3
68	Alat Pendingin (AC)	59
69	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2

No	Jenis Barang	Jumlah
70	Dispenser	7
71	Gorden	300
72	Gorden (M2)	207
73	Jam Dinding	5
74	Jam Standing	1
75	Kompor Gas	1
76	Kulkas	1
77	Lampu Hias	1
78	Lampu Sorot	2
79	Lampu Taman Kantor	8
80	LED TV	4
81	Lemari Es	3
82	Lemari Makan	1
83	Pemadam Api Otomatis	4
84	Pompa Air	2
85	Sofa	10
86	Tabung Gas	1
87	Tangga	2
88	Tangga Aluminium	2
89	Televisi	7
90	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	4
91	Troli	3
92	UPS/STABILIZER	62
93	Vacum Cleaner	1
94	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7
97	Kursi Rapat	62
98	Kursi Ruang tunggu	2
99	Sofa Tamu	1
100	Kursi Staf	35
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
102	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4
103	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
104	Meja Makan	2
105	Meja Rapat	5
106	Meja Resepsionis	3
107	Proyektor + Attachment	1
108	Microphone/Wireless Mic	1
109	Battery Charger	1
110	Peralatan studio Visual Lain-lain	1
111	Off Air TV Monitor	1
112	Tripod Camera	1
113	Mixer PVC	1
114	Loudspeaker	2

No	Jenis Barang	Jumlah
115	Portable AMF + Wireless Mic (TOA)	2
116	Bracket LED TV	1
117	Speaker Box	1
118	Wireless Mic	1
119	Power Mixer	1
120	Stand Speaker	2
121	Peralatan Audio Visual	1
122	Alat Keamanan Lain-lain	4
123	Borgol	4
124	Controler Sirene (Uquity)	2
125	IP Camera (Uquity) CCTV	44
126	NVR	1
127	Motion Sensor (Uquity)	4
128	Peluit	8
129	Sangkur	8
130	Temperatur Sensor (Uquity)	4
131	Pentung	8
132	AP Indoor	17
133	Caddy HDD Swap 3.5	3
134	Caddy HDD Tray 2.5	8
135	Centralized Ap Ceiling Indoor	4
136	Centralized Ap Outdoor	2
137	Dell Power Edge VRTX Tower Chassis	1
138	Edge Point	1
139	GiB SFP + Card Dual Port 10 GiB	3
140	Hardisk Server	31
141	HARDRIVE	5
142	HDD Backplane	2
143	HDD DATA CENTER	10
144	Integrated Management Module Server	4
145	IP Camera	8
146	Kabel Mini SAS	4
147	Komputer Main Frame/server	4
148	LAN Card Quad Port 1 GiB	1
149	Load Balancer Enterprise	2
150	Memory 4GB ECC	2
151	Memory ECC 8 GB	11
152	Peralatan Jaringan Lain-lain	17
153	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
154	Printer Dot Matrix	9
155	Printer Laserjet	92
156	Printer Portable	1
157	Printer Scanner DR	1
158	Printer Warna	22
159	Router	22

No	Jenis Barang	Jumlah
160	SAS Controller Card	2
161	Scanner	11
162	Security Gateway	1
163	SFP Card 10GB Dual Port	2
164	SFP Card 10GB Single Port	2
165	SFP Transceiver 10GB	12
166	SSD Msata 64GB	1
167	Switch POE	1
168	Switch SFP	10
169	Wireless Projector Adapter	1

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau Semester I 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
2. Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
3. Rata-rata waktu pemrosesan SPM
4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
6. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
7. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	100%	100%	100%
3	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	n/a	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
5	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11 %	11,52%	12,60%	13,68%	14,76%	15,84%	11,33%	11,33%	12,34%	12,34%	98,35%	89,92%	90,20%	90,78%
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66 %	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	100%	100%	91,66%	98,50%	91,67%	100%	100%	107%	101%
7.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas ada 7 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berikut adalah uraian capaian realisasi kinerja 7 Indikator tersebut pada tahun 2021 :

1. Capaian Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD pada Tanggal 6 September 2020, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu. Capaian ini lebih baik dari tahun 2019, dimana penyampaian RAPBD ke DPRD disampaikan pada tanggal 18 September 2019 dan pada Tahun 2021 untuk Penyusunan RAPBD Tahun 2022 juga dilaksanakan dengan tepat waktu.

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%, hal ini sudah sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Permendagri tersebut Penyampaian Rancangan Peraturan daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke dua bulan September. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2021. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra 2019 – 2024.
3. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari, sejak Tanggal diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu 2 hari.
4. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah 100% yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov Riau sudah menerima Opini WTP sudah 10 (Sepuluh) kali berturut – turut. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
5. Capaian Indikator Kinerja dari bangunan yang telah diinventarisasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 89.92 % dengan realisasi 11.33% dari 11.52% yang target dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 472 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.

6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,66% atau 11 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2020.
7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2020

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		RasioRealisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2019)	2 (2020)	1 (2019)	2 (2020)	1 (2019)	2 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	PENDAPATAN DAERAH	Rp 9,426,063,395,934.65	Rp 8,736,933,522,998.05	Rp 8,703,232,610,159.97	Rp 8,622,824,848,906.57	92.33%	98.69%	0%	-1%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 3,609,065,922,066.65	Rp 3,316,666,329,545.05	Rp 3,558,210,585,339.97	Rp 3,333,176,032,497.57	98.59%	100.50%	1%	7%
4.1.1.	Pajak Daerah	Rp 3,124,921,490,773.74	Rp 2,830,582,119,760.60	Rp 2,989,749,791,033.00	Rp 2,783,421,363,943.00	95.67%	98.33%	1%	8%
4.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 19,171,327,000.00	Rp 11,972,050,613.00	Rp 15,741,302,452.00	Rp 12,480,391,250.00	82.11%	104.25%	18224%	-21%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 138,312,608,248.80	Rp 88,442,501,751.00	Rp 118,530,642,555.72	Rp 88,442,501,751.00	85.70%	100.00%	11%	38%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 326,660,496,044.11	Rp 385,669,657,420.45	Rp 434,188,849,299.25	Rp 448,831,775,553.57	132.92%	116.38%	4%	-5%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	Rp 5,803,957,479,868.00	Rp 5,396,772,575,453.00	Rp 5,136,706,027,820.00	Rp 5,266,154,198,405.00	88.50%	97.58%	0%	-7%
4.2.1.	Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 2,250,306,849,665.00	Rp 1,929,590,314,453.00	Rp 1,674,431,560,210.00	Rp 1,832,898,379,231.00	74.41%	94.99%	0%	0%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 1,548,578,928,000.00	Rp 1,439,451,620,000.00	Rp 1,548,578,928,000.00	Rp 1,432,349,278,000.00	100.00%	99.51%	0%	0%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 2,005,071,702,203.00	Rp 2,027,730,641,000.00	Rp 1,913,695,539,610.00	Rp 2,000,906,541,174.00	95.44%	98.68%	1%	-16%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 13,039,994,000.00	Rp 23,494,618,000.00	Rp 8,315,997,000.00	Rp 23,494,618,004.00	63.77%	100.00%	63%	266%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	Rp 3,192,000,000.00	Rp 3,251,000,000.00	Rp 3,392,000,000.00	Rp 3,251,000,004.00	106.27%	100.00%	0%	-7%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 9,847,994,000.00	Rp 20,243,618,000.00	Rp 4,923,997,000.00	Rp 20,243,618,000.00	50.00%	100.00%	0%	0%
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 9,426,063,395,934.65	Rp 8,736,933,522,998.05	Rp 8,703,232,610,159.97	Rp 8,622,824,848,906.57	92.33%	98.69%	0%	-1%
5.	BELANJA DAERAH	Rp 9,179,049,316,919.66	Rp 8,810,484,158,933.52	Rp 8,690,390,951,116.70	Rp 8,172,706,474,615.31	94.68%	92.76%	1%	3%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 5,076,486,819,756.50	Rp 5,441,919,957,973.00	Rp 5,293,258,459,338.70	Rp 5,133,319,819,218.92	104.27%	94.33%	2%	8%
5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 2,415,452,829,615.20	Rp 2,357,537,903,713.13	Rp 2,290,728,232,675.00	Rp 2,153,065,317,382.00	94.84%	91.33%	0%	2%
5.1.4.	Belanja Hibah	Rp 1,095,745,655,200.00	Rp 1,283,525,828,400.00	Rp 1,153,737,273,734.00	Rp 1,241,053,925,700.00	105.29%	96.69%	1%	39%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 22,000,000,000.00	Rp 20,382,428,240.00	Rp 11,244,439,000.00	Rp 15,770,888,240.00	51.11%	77.37%	-7%	148%
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 1,414,073,874,817.12	Rp 1,194,074,600,669.92	Rp 1,404,733,869,544.70	Rp 1,194,074,600,669.92	99.34%	100.00%	1%	2%
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 99,040,277,250.00	Rp 464,930,700,000.00	Rp 432,543,325,499.00	Rp 430,263,450,473.00	436.73%	92.54%	95%	5%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	Rp 30,174,182,874.18	Rp 121,468,496,949.95	Rp 271,318,886.00	Rp 99,091,636,754.00	0.90%	81.58%	117%	0%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp 4,102,562,497,163.16	Rp 3,368,564,200,960.52	Rp 3,397,132,491,778.00	Rp 3,039,386,655,396.39	82.81%	90.23%	2%	-4%
5.2.1.	Belanja Pegawai	Rp 100,000,000.00	Rp -	Rp 14,537,712.00	Rp -	14.54%	0.00%	0%	0%
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,438,954,901,722.34	Rp 2,301,594,832,455.35	Rp 2,236,080,485,213.82	Rp 2,120,141,061,825.87	91.68%	92.12%	2%	-16%
5.2.3.	Belanja Modal	Rp 1,663,507,595,440.82	Rp 1,066,969,368,505.17	Rp 1,161,037,468,852.18	Rp 919,245,593,570.52	69.79%	86.15%	10%	58%
	JUMLAH BELANJA	Rp 9,179,049,316,919.66	Rp 8,810,484,158,933.52	Rp 8,690,390,951,116.70	Rp 8,172,706,474,615.31	94.68%	92.76%	1%	3%

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan	
		3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	PENDAPATAN DAERAH	9.183.690.915.424,00	8.948.201.160.414,00	10.235.036.780.199,00	9.383.001.507.905,44	8.818.669.764.115,17	10.009.979.591.478,20	102,17	98,55	97,80	0%	11,26%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.014.678.028.946,00	4.854.503.225.590,00	5.801.084.335.607,00	4.050.468.561.143,44	4.696.769.079.910,17	5.891.605.742.972,21	100,89	96,75	101,56	1%	8,74%
4.1.1.	Pajak Daerah	3.312.414.331.190,00	3.784.151.194.784,00	4.365.532.859.053,00	3.327.500.336.694,85	4.054.918.904.730,36	4.412.361.453.766,84	100,46	107,16	101,07	1%	0,78%
4.1.2.	Retribusi Daerah	17.215.784.040,00	15.643.150.000,00	18.586.888.850,00	13.790.515.597,00	16.684.961.995,00	17.145.487.538,50	80,10	106,66	92,25	1822%	16,10%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.402.606.804,00	519.395.517.928,00	954.288.533.724,00	117.417.430.069,00	101.607.146.246,00	948.660.382.439,65	100,01	19,56	99,41	11%	3,29%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	567.645.306.912,45	535.313.362.878,00	462.676.053.980,00	591.760.278.782,59	523.558.066.938,81	513.438.419.227,22	104,25	97,80	110,97	4%	-6,52%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.133.809.187.478,00	4.056.089.449.824,00	4.403.412.118.592,00	5.324.745.236.758,00	4.113.106.484.205,00	4.087.748.162.506,00	103,09	100,42	92,83	0%	-6,52%
4.2.1.	Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.598.103.644.478,00	1.010.945.591.997,00	1.832.034.058.592,00	1.841.136.598.312,00	1.664.531.062.715,00	1.536.866.672.146,00	118,98	96,97	83,89	0%	-6,66%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.455.383.959.000,00	577.425.660.956,00	1.506.322.398.000,00	1.455.383.959.000,00	1.452.245.879.000,00	1.506.286.541.167,00	104,82	118,49	99,99	0%	-2,46%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	2.080.321.584.000,00	1.015.472.317.871,00	303.091.172.000,00	1.995.755.980.446,00	956.328.413.490,00	295.138.574.452,00	100,00	100,00	97,38	1%	-0,79%
4.2.4.	Dana Penyesuaian	32.468.699.000,00	28.581.370.000,00	761.964.490.000,00	32.468.699.000,00	40.001.129.000,00	749.456.374.741,00	95,93	94,18	98,36	0%	-24,03%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.735.000.000,00	9.047.115.000,00	8.992.680.000,00	7.787.710.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	100,00	140,05	100,95	63%	11,63%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	2.735.000.000,00	9.047.115.000,00	8.992.680.000,00	7.787.710.004,00	8.794.200.000,00	9.078.040.000,00	100,00	140,05	100,95	0%	11,63%
	JUMLAH PENDAPATAN	9.183.690.915.424,00	8.948.201.160.414,00	10.235.036.780.199,00	9.383.001.507.905,44	8.818.669.764.115,17	10.009.979.591.478,20	102,17	98,55	97,80	0%	17,12%
5.	BELANJA DAERAH	9.715.374.904.870,00	9.807.168.258.136,00	10.810.571.707.728,00	8.172.706.474.595,31	8.931.704.166.450,55	10.515.609.539.104,00	91,93	92,81	97,27	0%	0
5.1.	BELANJA OPERASI	6.526.461.934.717,00	5.877.894.092.807,00	5.972.851.645.524,00	6.062.992.053.173,52	5.501.708.100.712,17	5.786.780.208.975,00	92,90	93,60	96,88	1%	2
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.318.661.485.990,00	2.405.237.030.930,00	2.609.355.838.396,00	2.213.182.776.667,00	2.318.631.227.769,00	2.549.829.683.419,00	95,45	96,40	97,72	2%	7
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.749.750.400.302,00	3.081.216.285.435,00	2.930.933.681.961,00	2.448.186.175.191,09	2.826.881.501.749,42	2.811.156.492.698,00	89,03	91,75	95,91	0%	-75,85%
5.1.5.	Belanja Hibah	1.396.520.518.425,00	346.639.306.442,00	396.745.845.167,00	1.349.812.571.315,43	314.456.061.193,75	390.363.362.858,00	96,66	90,72	98,39	1%	-75,12%
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	61.529.530.000,00	44.801.470.000,00	35.816.280.000,00	51.810.530.000,00	41.739.310.000,00	35.430.670.000,00	84,20	93,17	98,92	-7%	10,88%
5.2.	BELANJA MODAL	1.249.559.519.772,00	1.816.286.603.965,00	2.167.529.416.929,00	1.018.455.078.253,37	1.508.534.414.100,59	2.082.967.692.540,00	81,51	83,06	96,10	1%	-340,56%
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	801.982.178,00	0,00	17.738.404.000,00	801.221.880,00	0,00	16.531.477.000,00	99,91	0,00	93,20	95%	10,44%
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja	340.432.504.177,00	397.773.479.380,00	439.992.705.394,00	259.296.406.464,29	364.092.775.625,82	421.123.195.861,00	76,17	91,53	95,71	117%	19,01%
5.2.3.	Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal	280.525.464.255,00	347.975.821.362,00	407.378.302.771,00	239.980.341.418,23	289.084.106.026,11	391.132.240.152,00	85,55	83,08	96,01	2%	5,28%
5.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset	577.701.191.645,00	1.022.690.144.407,00	1.240.049.557.979,00	470.432.878.695,85	807.750.958.592,66	1.195.568.098.007,00	81,43	78,98	96,41	0%	-0,15%
5.2.5.	Tetap Lainnya	50.098.377.517,00	45.283.168.041,00	57.849.163.180,00	47.944.229.795,00	45.348.812.861,00	57.537.611.640,00	95,70	100,14	99,46	2%	-35,62%
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	2.563.990.775,00	4.521.283.605,00	0,00	2.257.760.995,00	1.075.029.880,00	0,00	88,06	23,78	10%	-10962,78%
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	46.373.907.506,00	19.726.571.303,00	18.064.238.270,00	245.808.686,00	9.830.848.980,00	249.778.000,00	0,53	49,84	1,38	1%	-10962,78%
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	46.373.907.506,00	19.726.571.303,00	18.064.238.270,00	245.808.686,00	9.830.848.980,00	249.778.000,00	0,53	49,84	1,38	63%	7
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.892.979.542.875,00	2.093.260.990.061,00	2.083.597.551.764,00	1.850.011.226.337,66	2.082.394.059.028,62	2.645.611.859.589,00	92,50	92,81	99,75	0%	8
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	1.512.628.905.875,00	1.665.840.182.461,00	2.083.597.551.764,00	1.498.191.320.346,70	1.665.840.182.459,62	2.083.597.551.764,00	99,05	100,00	100,00	0%	4
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	380.350.637.000,00	427.420.807.600,00	568.528.855.241,00	351.819.905.990,96	416.553.876.569,00	562.014.307.825,00	87,65	94,70	98,85	0%	0
	JUMLAH BELANJA	9.715.374.904.870,00	9.807.168.258.136,00	10.810.571.707.728,00	8.172.706.474.595,31	8.818.669.764.115,17	10.515.609.539.104,00	91,93	97,46	97,27	1%	3%

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

BPKAD Provinsi Riau, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan berupaya untuk memberi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD;
2. Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan amanat Perundang-undangan;
3. Perbaikan mutu layanan melalui penyusunan peta proses bisnis dan penyempurnaan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Review dan revisi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pengelolaan Uang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Inventasi Daerah dan lain-lain;
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta kastemisasi Aplikasi SIPKD Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri turunannya;
6. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
7. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan melalui aspek spritual, pengetahuan dan kompetensi, yaitu dilakukan antara lain dengan penegasan komitmen bersama untuk implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
8. Peningkatan pelaksanaan Penatausahaan Kegiatan dengan menggunakan transaksi non-Tunai;
9. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalisasi Barang Milik Daerah sehingga bernilai harmonis dan berkontribusi terhadap PAD serta melaksanakan pengawasan BMD melalui Sertifikasi Aset.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau Provinsi Riau merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan. Kelompok Sasaran Layanan BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau dan Stake Holder terkait. Pelayanan yang diberikan BPKAD berupa pelayanan Perbendaharaan seperti Pemrosesan SPM menjadi SP2D, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi ASN Pemprov Riau, Pelayanan Penyusunan Anggaran seperti RKA atau DPA, Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan seperti Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, serta Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 permasalahan dibidang keuangan yaitu masih rendahnya kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Bila dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 40,88% atau Sebesar Rp 3,558 Triliun dari Rp 8,703 Triliun Jumlah Pendapatan Daerah, sedangkan tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 38,65% atau sebesar Rp 3,333 Triliun dari Rp 8,622 Triliun Jumlah Pendapatan Daerah. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 2,23%. Sementara dana perimbangan kontribusinya justru semakin meningkat. Pada Tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 59,02% atau sebesar Rp 5,136 Triliun, pada tahun 2020 menjadi 54,20%. Demikian pula halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga terjadi penurunan dari 11,77% pada tahun 2019 menjadi 5,09%. Untuk masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Riau. Karena akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mempengaruhi terhadap Likuiditas dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;	Sistem informasi pemerintah daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2025 - 2026.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Tujuan atau Sasaran Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ”** dengan sasaran:

a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

b) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- d) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Sesuai jabaran tantangan – tantangan diatas untuk meminimalisasi permasalahan BPKAD Provinsi Riau perlu memanfaatkan peluang – peluang semaksimalnya, antara lain :

- a) Reformasi birokrasi pelayanan publik yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
- b) Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

- c) Peningkatan kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada seluruh aspek layanan di BPKAD Provinsi Riau.
- d) Dalam rangka membantu SKPD untuk melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada bendahara, PPK dan Sekretaris seluruh SKPD dalam Aplikasi SIPD dan SIPKD.
- e) Ketersediaan Tenaga Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi sehingga mampu mendukung penerapan layanan secara terintegrasi.
- f) Ketersediaan anggaran belanja pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- g) Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

Dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang sebagai mana diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyusun program - program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan- kegiatan dan sub-sub kegiatan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian kinerja mencapaikinerja organisasi sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Jangka Panjang Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPD 2025-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum

Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
5. Belum Optimalnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
8. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
9. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
10. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
11. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

Sesuai dengan uraian Renstra Kementrian Keuangan diatas tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang terkait secara

langsung adalah berkenaan dengan Program Pengelolaan Anggaran Negara, Program Perbendaharaan Negara, Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Berkenaan dengan uraian di atas adapun faktor penghambat dan pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau, jika di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Provinsi Riau sesuai Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan)

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan)	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.	1. Semakin menurunnya Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Riau, sesuai data yang diperoleh dari <i>Lap. Reviu indeks Kemandirian daerah, BPK RI</i> dari tahun 2015-2020 indeks Kemandirian Fiskal cenderung menurun pada tahun 2015 dari 0,5031 menurun menjadi 0,3895 pada tahun 2020.	1. Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemungutan pajak daerah	1. Potensi Sektor Perkebunan Provinsi Riau sangat besar
2. Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.		2. Adanya dampak negatif lingkungan dan kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut hasil perkebunan (sawit) maupun CPO.	2. Berdasarkan laporan perekonomian Riau Februari 2023 yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Riau, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan menuju trend perbaikan seiring dengan membaiknya permintaan domestik maupun global
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.			
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif	2. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020 menjadi -1,12 yang	3. Kontribusi perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap pendapatan asli	

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Keuangan)	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
dengan Risiko yang Terkendali.	mengakibatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi menurun.	daerah provinsi diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar. Khusus pajak bahan bakar yang digunakan pada sektor industri tidak dapat dipungut PBBKB	
5 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.		4. Sumber utama PAD berasal dari pajak daerah, yang sangat tergantung dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	3. Pendapatan BUMD dan BLUD sebagai salah satu penyumbang PAD 4. Alih kelola Blok Rokan kepada Pertamina pada tahun 2021, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Riau, yaitu melalui pelibatan kontraktor maupun subkontraktor lokal/nasional di wilayah kuasa pertambahan blok rokan.

3.2 Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2026

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 2 (dua) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis. Dengan mengutamakan pelayanan public yang prima, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas APBD Kab / Kota serta pengelolaan Aset yang baik.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah”**.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah kolaboratif dan akuntabel.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah kolaboratif, dan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan diatas BPKAD Provinsi Riau mendukung Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah

kolaboratif, dan akuntabel dengan Indikator Capaian Akuntabilitas Keuangan dengan target pada tahun 2025 – 2026 adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Provinsi Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota”**.

Tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”** dengan Indikator Tujuan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang udah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah kamu menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1),
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3),
- Penyerapan anggaran (Dimensi 4),
- Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5),
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan		Target RPD (Kondisi Akhir)
						2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Rata-rata waktu pemrosesan SPM		2 hari	2 hari	2 hari
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP
				Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi/Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan x 100	12,70%	12,80%	12,80%
				Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda APBD/Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda APBD x 100	91,66%	91,66%	91,66%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Tahunan		Target RPD (Kondisi Akhir)
						2025	2026	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Aset Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD/Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD x 100	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, sesuai Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran. Dari Indikator Sasaran tersebut ada 2 (Dua) Indikator Utama yaitu : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Tabel 4.2
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/Keterangan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau	Kriteria yang harus dipenuhi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Sistem Pengendalian Internal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan 4. Kecukupan pengungkapan pada Catatan Laporan Keuangan	WTP
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Aset Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian RAPBD Kab/Kota dengan Peraturan yang lebih tinggi dan dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang dtindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota}} \times 100$	100 %

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

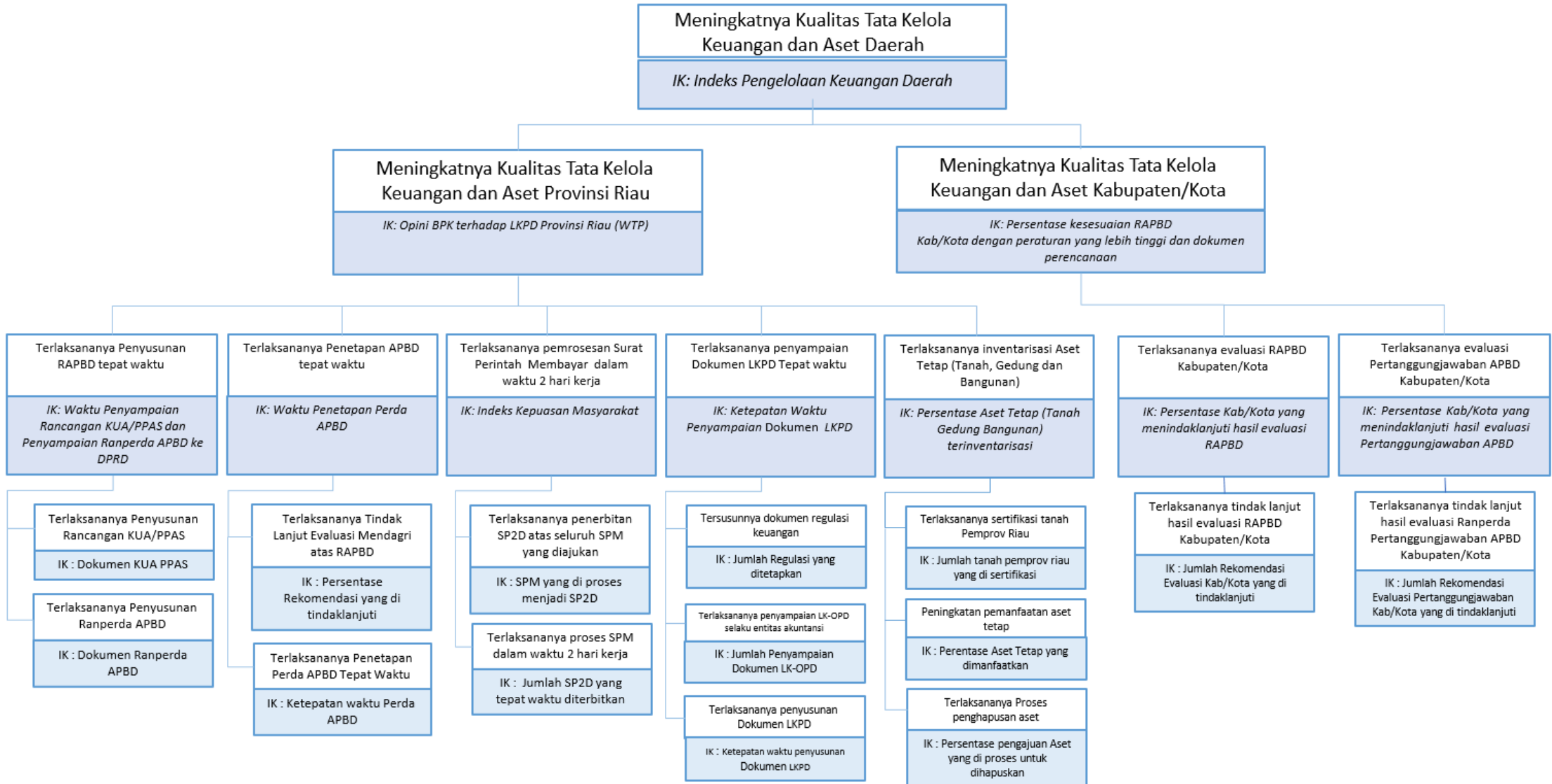
Cascading/perjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Perjenjangan kinerja dilakukan dengan menentukan hasil (*outcome*), kemudian menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), lalu menguraikan faktor kunci keberhasilan kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional, merumuskan indikator kinerja dan menerjemahkan cascading/pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Cascading/Pohon Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dijabarkan dengan menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran, dimana penghitungan nilai tujuan merupakan agregasi dari nilai kedua sasaran dibawahnya. Selanjutnya, sasaran organisasi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) sasaran program dan 14 (empat belas) sasaran kegiatan. Penyusunan cascading pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dilakukan dengan menyelaraskan sasaran strategis, indikator kinerja secara vertical dan memperhatikan tugas dan tanggungjawab dari setiap jabatan. Penyusunan cascading BPKAD Provinsi Riau menggunakan pendekatan supportive dimana indikator kinerja bawahan harus mendukung indikator kinerja sasaran di atasnya.

Cascading/Pohon Kinerja BPKAD Provinsi Riau sebagaimana gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1 Cascading Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Diantaranya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, strategi yang dilakukan adalah Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten /Kota, strategi yang dilakukan adalah Evaluasi APBD Kab/Kota sesuai Peundang-undangan yang Berlaku.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi. Diantaranya Peningkatan Koordinasi dan Kualitas SDM pada SKPD Kab / Kota, melaksanakan ketepatan waktu proses Pengelolaan Keuangan, dan Aset pada APBD Kab / Kota

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	IK TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah kolaboratif, dan akuntabel	Capaian Akutabilitas Keuangan	Indeks	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset

Pada Tabel 5.1 diatas, disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mendukung Arah Kebijakan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset, dengan Tujuan Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang digital yang lincah kolaboratif dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Capaian Akutabilitas Keuangan WTP.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2025 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran I) Kegiatan / Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 – 2026, adalah sebagai berikut yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
 - f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c) Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
 - d) Koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
 - e) Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - h) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - i) Pembinaan Perencanaan Penganggaran daerah Pemerintah Provinsi
- 10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a) Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

- b) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
- c) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- d) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- c) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- e) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban
- b) Konsolidasi Laporan Keuangan PD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- e) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

- f) Penyelenggaraan Akuntansi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c) Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

15) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Penyusunan Standar Harga
- b) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
- d) Inventarisasi Barang Milik Daerah
- e) Pengamanan Barang Milik Daerah
- f) Penilaian Barang Milik Daerah
- g) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- j) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode 2025 – 2026 mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Gubernur.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tertera dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11 %	12,70%	12,80%	12,80%
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66 %	91,66%	91,66%	91.66%
7.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen dan unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sehingga diharapkan akan dapat memprediksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset selama kurun waktu 2025-2026 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2025-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dimasa lima tahun mendatang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Riau Tahun 2025 – 2026.

Pekanbaru,
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

INDRA, SE. M.Si, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721115 199803 1 004

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN PERIODE 2025 - 2026
PRIORITAS RENSTRA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2026
PROVINSI RIAU

Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.000

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2022	2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan penerapan standar pelayanan dan Aset Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100 Persen	100 Persen	31,586,178,959	100 Persen	32,943,913,624	100 Persen	64,530,092,583		
				5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	125,000,000	3 Dokumen	130,000,000	3 Dokumen	255,000,000		
				5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	125,000,000	3 Dokumen	130,000,000	6 Dokumen	255,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	22,668,499,533	100 Persen	23,770,268,011	100 Persen	46,438,767,544		
				5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Perbulan	136 Orang / Perbulan	136 Orang / Perbulan	22,668,499,533	136 Orang / Perbulan	23,770,268,011	272 Orang / Bulan	46,438,767,544	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	27,500,000	2 Laporan	52,500,000		
				5.02.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	27,500,000	4 Laporan	52,500,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin ASN	Persentase	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100 Persen	100,000,000	100 Persen	200,000,000		
				5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	2 Paket	200,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase	100 Persen	100 Persen	2,405,879,426	100 Persen	2,486,879,426	100 Persen	4,886,758,852		
				5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	42,142,426	1 Paket	42,142,426	2 Paket	84,284,852	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	755,000,000	1 Paket	755,000,000	2 Paket	1,510,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	289,988,000	1 Paket	289,988,000	2 Paket	579,976,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	443,749,000	1 Paket	443,749,000	2 Paket	887,498,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	775,000,000	2 Paket	1,475,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Informasi SPBE di bidang keuangan	Persen	0 Persen	100 Persen	175,000,000	100 Persen	175,000,000	100 Persen	350,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				588.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	55 Unit	55 Unit	546,000,000	55 Unit	548,000,000	101 Unit	1,094,000,000		
				5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0 Unit	55 Unit	546,000,000	55 Unit	548,000,000	156 Unit	1,094,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase	100 Persen	100 Persen	4,380,000,000	100 Persen	4,495,000,000	100 Persen	8,875,000,000		
				5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	surat	610 surat	610 surat	30,000,000	610 surat	30,000,000	610 surat	60,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	rekening	48 rekening	48 rekening	750,000,000	48 rekening	810,000,000	48 rekening	1,560,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.001.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,600,000,000	1 Laporan	3,655,000,000	2 Laporan	7,255,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	1,335,800,000	100 Persen	1,392,266,187	100 Persen	2,728,066,187		
				5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	21 Unit	25 Unit	741,000,000	25 Unit	741,000,000	50 Unit	1,482,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 Unit	50 Unit	194,800,000	50 Unit	194,800,000	100 Unit	389,600,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1 Gedung	2 Gedung	400,000,000	2 Gedung	456,466,187	4 Gedung	856,466,187	Sekretariat	Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2022	2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah Yang Dikelola	Persentase	100 Persen	100 Persen	1,566,222,831,328	100 Persen	1,602,554,590,668	100 Persen	3,170,777,421,996		
				5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA, PPAS, Perubahan KUA, Perubahan PPAS, Perda tentang APBD, PerKDH tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan	Persentase	100 Persen	100 Persen	2,801,399,536	100 Persen	2,801,399,536	100 Persen	5,602,799,072		
				5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	122,939,986	12 Dokumen	125,914,238	24 Dokumen	248,854,224	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	182,500,000	2 Dokumen	187,525,748	4 Dokumen	370,025,748	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2 Dokumen	22 Dokumen	58,720,550	22 Dokumen	58,720,550	44 Dokumen	117,441,100	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2 Dokumen	22 Dokumen	34,939,000	22 Dokumen	34,939,000	44 Dokumen	69,878,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2 Dokumen	22 Dokumen	36,700,000	22 Dokumen	36,700,000	44 Dokumen	73,400,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2 Dokumen	22 Dokumen	79,600,000	22 Dokumen	79,600,000	44 Dokumen	159,200,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	795,000,000	10 Dokumen	780,000,000	10 Dokumen	1,575,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	944,000,000	10 Dokumen	945,000,000	10 Dokumen	1,889,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	167,000,000	2 Dokumen	168,000,000	6 Dokumen	335,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	-	220 Orang	380,000,000	220 Orang	385,000,000	440 Orang	765,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100 Persen	100 Persen	928,000,000	100 Persen	968,000,000	100 Persen	1,896,000,000	Bidang Anggaran Daerah	
				5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	333,000,000	12 Laporan	333,000,000	24 Laporan	666,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	235,000,000	12 Laporan	235,000,000	24 Laporan	470,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105,000,000	12 Laporan	105,000,000	24 Laporan	210,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	75,000,000	2 Laporan	110,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02.10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	115,000,000	12 Dokumen	115,000,000	24 Laporan	230,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
				5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	105,000,000	4 Dokumen	210,000,000	Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2022	2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi Perbendaharaan daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	902,106,350	100 Persen	902,106,350	100 Persen	1,804,212,700	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	228,659,000	1 Dokumen	228,659,000	1 Dokumen	457,318,000	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			1 Laporan	205,000,000	1 Laporan	205,000,000	2 Laporan	410,000,000	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	153,447,350	12 Dokumen	153,447,350	48 Dokumen	306,894,700	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	330,000,000	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.03.10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina penatausahaannya		-	12 Kab/Kota	150,000,000	12 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	300,000,000	Bidang Perben dan Kasda	Prov. Riau
				5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	900,000,000	100 Persen	900,000,000	100 Persen	1,800,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	
				5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
				5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	185,000,000	14 Laporan	185,000,000	28 Laporan	370,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
				5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	285,000,000	2 Dokumen	285,000,000	4 Dokumen	570,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
				5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat	
				5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	105,000,000	4 Dokumen	210,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
				5.02.02.1.04.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	33 Orang	33 Orang	125,000,000	33 Orang	125,000,000	132 Dokumen	250,000,000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
				5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Persentase	100 Persen	100 Persen	1,562,441,325,442	100 Persen	1,596,733,084,782	100 Persen	3,159,174,410,224	Sekretariat	
				5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	361,989,500,000	1 Laporan	361,989,500,000	2 Laporan	723,979,000,000	Sekretariat	Prov. Riau
				5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000,000	1 Laporan	50,000,000,000	2 Laporan	100,000,000,000	Sekretariat	Prov. Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2022	2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				5.02.02.1.05.010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,150,451,825,442	1 Laporan	1,184,743,584,782	2 Laporan	2,335,195,410,224	Sekretariat	Prov. Riau	
				5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	250,000,000	100 Persen	250,000,000	100 Persen	500,000,000	Sekretariat		
				5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	500,000,000	Sekretariat	Prov. Riau	
				5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dikelola	Persentase	100 Persen	100 Persen	2,349,124,000	100 Persen	2,384,124,000	100 Persen	4,733,248,000			
				5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100 Persen	100 Persen	2,349,124,000	100 Persen	2,384,124,000	100 Persen	4,733,248,000	Bidang PBMD		
				5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	277,116,000	1 Dokumen	277,116,000	2 Dokumen	554,232,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	125,000,000	4 Dokumen	250,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	195,000,000	1 Dokumen	195,000,000	2 Dokumen	390,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	225,000,000	7 Laporan	225,000,000	14 Laporan	450,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	875,000,000	1 Laporan	875,000,000	2 Laporan	1,750,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	1 Laporan	275,000,000	2 Laporan	550,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	105,000,000	2 Laporan	210,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	102,008,000	2 Dokumen	102,008,000	4 Dokumen	204,016,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	2 Laporan	110,000,000	4 Laporan	185,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	7 Laporan	7 Laporan	95,000,000	7 Laporan	95,000,000	14 Laporan	190,000,000	Bidang PBMD	Prov. Riau	
				JUMLAH													
										1,602,158,134,287		1,637,882,628,292		3,240,040,762,579			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Baseline 2022	2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**
Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru

